

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Hindia Belanda memasuki era baru dalam sistem ekonomi dan politiknya pasca kemenangan kaum Liberal dalam menghapus sistem feodalisme menjadi sistem ekonomi terbuka. Selama periode 1850 hingga 1870 merupakan tahun transisi dari praindustrial menuju industrial. Pada tahun 1848 membawa angin segar dalam reformasi politik kolonial melalui dewan parlementer, barulah 6 tahun setelahnya, *Regeerings Reglement* (RR) atau Undang-Undang yang menciptakan prinsip dasar politik Hindia Belanda ke arah liberalisme berkenaan dengan kebebasan individu, keamanan hak-hak dan usaha-usaha di dalam RR yang mencakup hal esensial (Kartodirdjo, 1990).

Sebagai tindak lanjut keinginan kaum liberal, pemerintah kolonial Hindia Belanda menghasilkan sebuah kebijakan ekonomi *Agrarische Wet* atau Undang-Undang Agraria 1870. Kebijakan ini yang di dalamnya mencakup penyewaan tanah dan Undang-Undang Pajak Kepala 1882 merupakan benih awal kemunculan tenaga kerja bebas, penanaman kapital swasta, ekspor ke pasar Eropa, dan akomodasi pendukung (Soewarsono, 2000).

Kepentingan ‘politik ekonomi pintu terbuka’ membawa kota-kota penunjang arus ekonomi menimbulkan permasalahan yang kompleks dari ketimpangan ekonomi, wabah penyakit, tata ruang kota yang kumuh, hingga

permasalahan lainnya. Ketika permasalahan yang terjadi di sebuah daerah harus melaporkan ke pusat di Batavia, sehingga penyelesaian masalah tidak cukup efektif. Untuk itu, perlu ada solusi dalam mengefisiensi kinerja yaitu dengan diberlakukannya *Decentralisatie Wet* (atau peraturan tentang otonomi) yang disahkan pada 1903, dan Semarang baru diberlakukan 3 tahun setelahnya.

Semarang merupakan salah satu kota pelabuhan yang ramai dalam arus perdagangan di Hindia Belanda selain Batavia dan Surabaya (Ingleson, 2013). Perkembangan kota Semarang semakin pesat karena menjadi arena swasta dalam membangun iklim pasar karena pintu masuk ke pedalaman pulau Jawa. Akibatnya, membutuhkan tenaga pekerja dalam membantu arus ekonomi tersebut dengan memunculkan kelas baru – yaitu kelas buruh yang bekerja di berbagai sektor industri maupun perkebunan swasta

Selain itu pemberlakuan *Etische Politiek* atau Politik Etis pada tahun 1900 memainkan peran penting dalam menumbuhkan kaum intelektual dan juga sebelumnya pembentukan serikat buruh impor Eropa memantik pertumbuhan serikat buruh pribumi di Hindia Belanda (Ds & Cahyono, 2003). Politik etis merupakan gagasan yang dikemukakan oleh Van Deventer dalam upaya balas budi pemerintah Hindia Belanda kepada kaum bumiputera yang merangkum bidang edukasi, irigasi, dan emigrasi. Adanya Politik Etis membuka cakrawala baru dalam membentuk cara pandang kaum bumiputera atas penjajahan yang dilakukan oleh Belanda. Politik Etis memberikan kesempatan bumiputera kalangan bangsawan dan anak-anak pegawai pemerintah kolonial dalam mengenyam pendidikan. Hasil dari Politik Etis melahirkan organisasi-organisasi yang dibuat oleh Bumiputera.

Sehubungan dengan itu, dasawarsa awal Abad ke-XX membawa angin segar dalam pertumbuhan pemikiran baru yang menandingi dominasi kapitalisme dan kekuatan koloni Hindia Belanda. Awalnya gagasan sosialisme hanya termuat untuk kalangan sosialis Belanda dari kalangan kelas pekerja yang terkoneksi dengan *Sociaal-Democratische Partij* (SDP) dan *Sociaal-Democratische Arbeidspartij* (SDAP) sebagai wadah untuk berdiskusi namun tidak untuk menyebarkan gagasan ke kaum bumiputera. Di Surabaya, lingkaran studi sosialis itu bernama organisasi *Indische Sociaal Democratische Vereeniging* (ISDV) berdiri pada 9 Mei 1914. Dalam majalah mingguan *De Indier* pada Mei 1914, mewartakan pendirian ISDV dihadiri lebih dari 30 orang (Latif, 2014) beberapa tokoh tersebut seperti; Asser Baars, N. Hulswit, R.A. Scothman, L.D.J. Reeser, dan Sneevliet (Blom & Stelling, 2004). Keragaman pemikiran terjadi di tubuh ISDV seperti golongan moderat sosial-demokrat, namun juga ada kaum sosialis revolusioner: komunis, anarkis, dan sindikalis. Kondisi ISDV yang diisi oleh berbagai macam aliran dan pemikiran mengenai kondisi koloni Hindia Belanda menjadi terpecah. Anggota yang didominasi oleh kaum moderat dikalahkan oleh kaum 'ekstrem kiri' yang terlihat dalam anggaran dasar ISDV (Jauhari, 2022).

Sneevliet melihat bahwa dalam memuluskan agenda sosialisme di Hindia Belanda harus berkolaborasi dengan elemen sosialis lainnya. Ia hijrah ke Semarang membangun koneksi dengan Insulinde walau akhirnya gagal karena ketidakcocokan dan kurang dalam kuantitas massa. Akhirnya, beralih

ke Sarekat Islam, sebuah organisasi kaum muslim yang memiliki anggota terbesar di Hindia Belanda. Sneevliet bertemu dengan Semaoen dan Darsono dalam membantu propaganda sosialisme di tanah koloni.

Euforia Revolusi Rusia 1917 dimanfaatkan oleh Sneevliet yang tersaji di dalam tulisan *Zegepraal* ditanggapi secara antusias oleh kaum bumiputera dan justru mencengangkan bagi pemerintah. Sneevliet ‘kerap’ disebutkan sebagai seorang anarkis atau sosialis murni yang anti terhadap pemerintah (Jauhari, 2022). Dalam surat kabar berbahasa Belanda menyebutkan Sneevliet sebagai anarkis revolusioner (Stutje, 2017). Akibat propagandanya, pada tahun 1918 Sneevliet diusir dari Hindia Belanda oleh pemerintah kolonial.

Perjalanan sosialisme revolusioner di Hindia Belanda tidak semulus itu, berbagai macam pertentangan. Misalnya, pertentangan di tubuh Sarekat Islam menegang antara Central Sarekat Islam (CSI) di Surabaya dan Sarekat Islam (SI) Semarang. Perpecahan terus berlangsung hingga mendikotomi SI Putih dan SI Merah. SI Merah kemudian berganti nama menjadi Sarekat Ra’jat (SR).

SI Semarang menggunakan media *Sinar Djawa/Sinar Hindia* sebagai corong penyebaran sosialisme dan komunisme. Darsono, seorang pengagum Sneevliet, antara tahun 1918-1919 beberapa kali menyanjung pemikiran anarkis atau nihilis dalam tulisannya, walau ia menganggap dirinya bukan seorang anarkis. Pasca pembuangan Sneevliet, ISDV dan SI Semarang tidak jauh berbeda, banyak anggotanya merupakan anggota kedua

(Gie, 1999). Akhirnya, ISDV berganti nama menjadi Perserikatan Komunis (di) Indonesia atau PKI pada 23 Mei 1920. Pengaruh Bolshevik di ISDV atau PKI yang bersimpati kepada Lenin dan Trotsky tidak menghilangkan pengaruh anarkis di organisasi tersebut (Stutje, 2017).

Pada 1920an, pemahaman sosialisme di masyarakat masih tampak kabur (Yuliati, 2022). Sosialisme dianggap sebagai “pergaulan hidup yang sama rata sama rasa” yang kerap condong ke arah pemikiran anarkisme mengenai terciptanya masyarakat egaliter. Walau tak ada seorang pun tokoh pergerakan yang mendaku dirinya sebagai anarkis (Stutje, 2017), aliran ini tak padam bersama penindasan terus berlangsung dan memuncak pada pemberontakan 1926-27.

Anarkisme merupakan salah satu varian dari pemikiran sosialisme, walau menjadi perdebatan di kalangan sosial-demokrat dan marxis yang tidak setuju dengan penggunaan teror yang dilakukan kaum anarkis. Seorang Sosial-Demokrat Jerman, William Liebknecht menyerang anarkisme yang memiliki sifat reaksioner dan individualis walau sekeras apapun pekikan revolusinya (Richard et al., 2012). Liebknecht beranggapan bahwa “anarchisme itoe anti-socialisme dan tiada setoedjoe akan penoentoetan men sama-rata-kan (*socialseering*) alat-alat pangkal kehasilan (*productie-middelen*)” (Mahatma Moerti, 1921). Argumentasi yang tidak sepenuhnya dibenarkan, karena seorang anarkis juga mencita-citakan asas sosialisme seperti Errico Malatesta dan Peter Kropotkin.

Secara etimologi, anarki berasal dari bahasa Yunani yaitu *a* berarti ‘tidak atau tanpa’ dan *archein* merujuk padanan kata pemerintah atau negara (F. Putra, 2022). Ketiadaan negara memungkinkan manusia merdeka dari penindasan yang terkandung di dalam sistem kenegaraan. Marshall berpendapat bahwa anarkisme seperti sungai dengan banyak arus dan pusaran, merangkul berbagai pemikiran dan strategi yang berbeda (Marshall, 2008). Sebab itu, kelenteruan anarkisme menciptakan kolaborasi dengan menghasilkan varian anarkisme dengan pandangan lain seperti: Anarkisme-Komunisme, Anarkisme-Sindikalisme, Anarkisme-Individualisme, Anarkisme-Pasifisme dan paham anarkisme lainnya.

Misalnya Anarkisme-Sindikalisme, sebuah kombinasi antara anarkisme dan sindikalisme revolusioner (serikat buruh) yang menghasilkan Anarko-sindikalisme karena memiliki tujuan yang sama mengenai korupsi Pemerintah (Satria Putra, 2018). Rudolf Rocker, seorang Anarkis yang mengkampanyekan Anti-Militerisme menjelaskan pandangannya mengenai Anarko-Sindikalisme, yaitu kaum Anarko-Sindikalis menitikberatkan pada aktivitas serikat buruh mengenai pendidikan Sosialis massa dan kebutuhan perjuangan sosial dan ekonomi para pekerja melalui aksi langsung (Rocker, 2021). Anarko-sindikalisme sering juga disebut sebagai sindikalis revolusioner yang melakukan aksinya melalui serikat buruh.

Serikat buruh paling militan dan memiliki jumlah anggota yang banyak adalah *Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel* (VSTP) dengan

markas di Semarang. VSTP. VSTP memiliki koneksi dengan *National Arbeids Secretary* (NAS) dengan andil pembangunan gerakan sindikalis di Hindia Belanda baik itu bantuan dana dan teknis dalam melakukan pemogokan (Satria Putra, 2018).

Bima (2018) mengkategorikan tokoh-tokoh atau golongan anarkis menjadi enam yaitu; 1) seorang anarkis tulen atau tentik dalam memiliki pemahaman secara teoritik seperti Herujuwono; 2) tokoh yang terpapar pemikiran anarkisme seperti Alimin dan Musso muda; 3) anarkis yang kontradiktif dengan menggabungkan atau tidak menghilangkan pemikiran nasionalisme seperti Ernest Douwes Dekker; 4) anarkis dari golongan serikat pekerja atau sindikalis seperti tokoh VSTP Pieter Bergsma dan Winanta; 3) tokoh nihilis yang bergerak secara rahasia; 6) tokoh yang menyokong komunisme dewan.

Pada tahun 1912, Ernest Douwes Dekker dalam tulisannya menyinggung prinsip-prinsip anarkisme dalam bergerak melalui aksi langsung dan tidak melalui parlementer. Ia menyebutkan sebagai “aksionis”, seseorang yang melakukan aksi langsung. Tahun ini menjadi awal kemunculan anarkisme secara prinsip.

Perbedaan Marxisme (dan Leninisme) dengan Anarkisme adalah tentang cara pandang mengenai negara. Marxisme berpandangan negara masih dibutuhkan sebagai transisi menuju masyarakat sosialisme, sedangkan anarkisme menolak keberadaan negara. Menurut Mikhail Bakunin, negara

adalah sumber dari segala penindasan terhadap manusia (Bakunin, 2021). Anarkisme menggunakan metode aksi langsung seperti pemogokan ke tingkat lebih ekstrem, yaitu sabotase, pelemparan bom, hingga pemberontakan bersenjata. Walau berbeda dengan anarkisme, Lenin merupakan Marxis pertama yang menganjurkan pemberontakan bersenjata (Stutje, 2017). Hal ini memudahkan cara pandang pemerintah Hindia Belanda mengenai pelemparan bom yang terjadi di Semarang, Surakarta, Yogyakarta, dan daerah lainnya diasosiasikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh komunis. Bolshevisme juga cenderung Anarkisme, meskipun dirinya menyebut komunisme, karena mengajarkan pengancuran semua otoritas negara (Bergmeyer, 1927).

Menurut William Ebenstein, Lenin menjelaskan bahwa seorang komunis hendaknya melakukan kegiatan rahasia di bawah tanah, sekalipun partai komunis diperbolehkan di negara tersebut. Lebih lanjut, Lenin menganjurkan harus ada kumpulan-kumpulan kecil kaum revolusioner yang profesional, dan masuk ke berbagai sektor masyarakat dan badan pemerintahan terutama angkatan bersenjata, kepolisian dan institusi pemerintahan (Ebenstein, 1963).

Tindakan represif yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda dalam menangkap, membui, dan membuang tokoh pergerakan melahirkan tindakan yang lebih keras yang ditujukan kepada otoritas negara. Anarkisme diserang dari kanan ke kiri, dari pemerintah hingga kaum pergerakan sendiri karena perlawanan sporadis dari individu-individu pemberani. Penggunaan

istilah ‘anarkis’ sering digunakan dalam kaca mata negatif yang merujuk terhadap tuduhan kekerasan atau strategi politik yang tidak efektif, tidak teratur, dan tidak tepat waktu (Stutje, 2017). Beberapa yang lain justru menyanjungnya sebagai tindakan keberanian yang dilakukan martir revolusi pergerakan. Darsono menganggap pemerintah sendiri yang melahirkan api anarkisme di kalangan kaum bumiputera.

Soe Hok Gie dalam buku *Di Bawah Lentera Merah: Riwayat Sarekat Islam Semarang Sampai Tahun 1920* berpandangan bahwa kaum komunis saat itu: “Apa yang dimaksud sebagai Marxisme, sulit dipertanggungjawabkan sebagai Marxisme”. Ketika pertumbuhan sosialisme mulai tumbuh di Hindia Belanda, asupan pemikiran sosialisme mulai disebarluaskan melalui surat kabar berbahasa melayu. Tak hanya komunisme, Gie melihat Darsono menyanjung nihilisme dalam surat kabar *Sinar Hindia* tanpa mengkritik pemahaman tersebut akan berbahaya bagi generasi selanjutnya (Gie, 1999).

J.T Petrus Blumberger dalam karyanya yang berjudul *De communistische beweging in Nederlandsch-Indië* yang telah dialihbahasakan ke bahasa Indonesia dengan judul *Gerakan Komunis Hindia Belanda* membantu penulis dalam menggali informasi pergerakan pada masa Hindia Belanda. Blumberger menuturkan perkembangan gerakan komunisme di Hindia Belanda hingga reaksi pemerintah terhadap gerakan tersebut. Puncaknya pembuangan para martir revolusi 1926-27. Setelah konferensi Jogja, tindakan ilegalisme dan terorisme PKI menguat. Alimin mengagitasi kaum miskin

dengan melakukan tindakan ilegalisme dengan membagi hasil 1/3 untuk pelaku dan 2/3 kebutuhan pergerakan PKI (Blumberger, 2018).

Bagi penulis, tidak ada seseorang seteliti Ruth Thomas Mcvey membicarakan komunisme di Indonesia. Buku *The Rise of Indonesian Communism* menjadi salah satu rujukan dalam penelitian ini. Kesesuaian dengan tema yang diangkat penulis, Mcvey menggambarkan situasi politik komunis dengan dukungan *underbouw* yang di Jawa dan menyebar hingga Sumatera. Ihwal ini melihat karakteristik landasan berpolitik PKI (dalam internal partai) dan agitasi menyebarkan sel-sel ke masyarakat dalam organisasi massa (seperti Sarekat Rakyat). Tindakan-tindakan seperti “mempromosikan propaganda kaum anarkis Indonesia, yang menganjurkan pembakaran terhadap industri gula, sumur minyak dan pekerjaan tembakau” menarik untuk dibahas (McVey, 1965).

Selain itu, Disertasi Dewi Yuliati yang dibukukan berjudul *Anak Hindia Sudah Berapi: Buruh dan Gerakan Antikolonialisme di Semarang (1908-1926)* memberi tambahan wawasan mengenai faktor-faktor penggerak kesadaran kelas buruh bumiputera di Semarang.

Selaras dengan dasar pemikiran tersebut, penulis menemukan dua sumber berbahasa Indonesia mengenai pembahasan khusus tentang anarkisme di Indonesia. Pertama, sebuah skripsi yang dibukukan karya Bima Satria Putra (2018), yaitu *Perang yang Tidak Akan Kita Menangkan: Anarkisme dan Sindikalisme dalam Pergerakan Kolonial hingga Revolusi*

Indonesia (1908-1948). Buku ini merupakan tulisan yang cukup lengkap merangkum berbagai peristiwa, pemikiran, dan tindakan dalam persinggungan antara kaum komunis (marxis) dan tendensi anarkisme, khususnya mengenai kegagalan pemberontakan 1926-27. Bima juga mengklasifikasi tokoh-tokoh yang disinyalir bersinggungan dengan tradisi anarkis.

Kedua, karya Pujo Nugroho (2019) yang berjudul *Kota Merah Hitam: Lintasan Waktu Anarkisme di Semarang* memberi gambaran kepada penulis mengenai fenomena anarkisme dengan Semarang sebagai lokalitas penelitian dalam kurun waktu kolonialisme Belanda hingga kontemporer. Menurut Pujo, kota Semarang tidak hanya merah (komunis) tapi juga hitam (warna yang identik dengan anarkisme). Walau begitu penulis menganggap buku ini sangat jauh dari kriteria penulisan historis yang baik karena konsep waktu yang terlalu luas.

Penulis menemukan jurnal secara spesifik membicarakan ‘hantu anarkisme’ yang berkembang di Hindia Belanda yaitu *‘Volk van Java, de Russische Revolutie houdt ook lessen in voor U’: Indonesisch socialisme, bolsjewisme, en het spook van het anarchisme* karya Klaas Stutje. Stutje melihat pertumbuhan anarkisme tertutup oleh ideologi komunisme akibat dari euforia revolusi 1917 yang disebarluaskan oleh Sneevliet. Beberapa surat kabar menyebut Sneevliet seorang anarkis. Dominasi komunisme dalam pergerakan bumiputera ingin menyingkirkan tendensi anarkis yang

dianggap reaksioner dan gegabah. Kendati begitu momok anarkis cukup meneror pemerintah Hindia Belanda.

Sumber informasi yang telah disebutkan di atas sangat menunjang dalam menulis *Semarang Berapi: Perkembangan Simpul Anarkisme di Semarang (1908-1926)* sebagai tema skripsi.

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Melalui pendekatan historis, penelitian yang berjudul *Semarang Berapi: Perkembangan Simpul Anarkisme di Semarang (1912-1926)* membatasi permasalahan secara spasial (ruang) dan temporal (waktu), selanjutnya batasan spasial dalam penelitian ini adalah perkembangan anarkisme dalam gerakan anti-kolonial di Semarang. Semarang dinilai sebagai arena besar dalam persebaran ideologi pembebasan sosialisme seperti komunisme dan anarkisme berkelindan dengan aktivitas lokal masyarakat bumiputera di Semarang. Penulis menggunakan istilah “Semarang Berapi” untuk menggambarkan kondisi kota Semarang dan aktivitas kaum bumiputera yang berapi-api dalam menentang pemerintah Hindia Belanda.

Sedangkan untuk temporal dalam penelitian ini berlangsung antara tahun 1912 hingga 1926. Tahun 1912 merupakan tahun kemunculan awal anarkisme yang terdokumentasi melalui pemikiran Douwes Dekker, sedangkan tahun 1926 merupakan tahun upaya pembasmian gerakan anti-

kolonial yang dipengaruhi pandangan anarkisme akibat terjadinya peristiwa revolusi yang dilakukan oleh kaum pergerakan sebelum akhirnya dibuang ke pedalaman Boven Digul. Hal ini membuat atmosfer revolusioner kian meredup.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan dasar pemikiran dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana perkembangan anarkisme dalam pergerakan di Semarang (1912- 1926)?
2. Apa dampak dari pengaruh anarkisme dalam perlawanan masyarakat Semarang terhadap Pemerintah Hindia Belanda (1912-1926)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan sebagaimana yang sudah dijabarkan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui perspektif lain dalam sejarah pergerakan kiri di Semarang, yakni serpihan jejak fenomena anarkisme yang masih sedikit diteliti oleh sejarawan Indonesia.
2. Mengetahui dinamika pergerakan antikolonial di Semarang dalam melihat pengaruh anarkisme dalam konstelasi sosial-politik melawan otoritas kolonial Hindia Belanda.

Berkenaan dengan tujuan di atas, penelitian ini setidaknya memiliki dua kegunaan dalam memperkaya khazanah pengetahuan sejarah Indonesia, yaitu:

1. Kegunaan Akademis

Sedikitnya kajian anarkisme dalam sejarah kiri Indonesia diharapkan membuka cakrawala kajian sejarah pemikiran, ideologi, atau paham nasional yang berkelindan dengan kondisi transnasional masyarakat dunia, sehingga diharapkan memberi sumbangsih terpadu sebagai kajian akademis yang dapat dipertanggung jawabkan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memberi informasi kepada masyarakat dalam melihat fenomena anarkisme sebagai pembelajaran tentang situasi dan kondisi saat ini.

D. Metode dan Sumber Penelitian

1. Metode Penelitian

Menurut Gottschalk (1985: 32), metode sejarah merupakan sebuah proses dalam menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Penggunaan metode sejarah dalam merekonstruksi kembali peristiwa berdasarkan sumber-sumber masa lalu yang ada, seorang penulis hendaknya membuat mekanisme secara terukur dan sistematis sebagai sebuah proses historiografi.

Keteraturan metode sejarah memudahkan dalam merekonstruksi peristiwa di masa lalu. Kuntowijoyo dalam buku *Pengantar Ilmu Sejarah* (2013) menerangkan bahwa metode sejarah meliputi: 1) pemilihan topik, 2) pengumpulan sumber, 3) verifikasi, 4) interpretasi, dan 5) penulisan atau historiografi.

Adapun langkah-langkah sebagai berikut.

Pertama, Pemilihan Topik adalah hal paling pertama dalam metode sejarah. Memilih topik penelitian sebaiknya selaras dengan kedekatan emosional dan intelektual (Kuntowijoyo, 2013). Penulis meyakini dalam memilih topik dengan judul *Semarang Berapi: Perkembangan Anarkisme di Semarang (1912-1926)* memiliki pengaruh emosional dengan ideologi anarkisme. Penulis memiliki ketertarikan pada pemikiran Anarkisme sebagai suatu prinsip hidup egaliter, kreativitas dan kebebasan, serta menolak keberadaan dominasi. Sehubungan dengan itu pembahasan ini sangat menarik untuk dibahas karena masih sedikit kepenulisan sejarah bertemakan “Anarkisme” di Indonesia oleh sejarawan. Selain itu, merujuk kedekatan intelektual penulis memiliki latar belakang dengan ilmu sejarah yang didapat di Program Studi Pendidikan Sejarah, membuat penulis sedikit banyak memanfaatkan metodologi sejarah mengenai topik yang dibahas secara akademis.

Kedua, Pengumpulan sumber atau heuristik merupakan aktivitas penulis dalam mencari dan mengumpulkan sumber-sumber penunjang

penelitian. Sumber-sumber tersebut terbagi menjadi dua, yaitu: sumber primer dan sumber sekunder.

Sumber primer berasal dari tangan pertama (Gottschalk, 1986). Penemuan sumber primer diambil dari dokumen atau arsip, artikel berita sezaman, dan tulisan dari tokoh atau sebuah organisasi. Penelitian ini memanfaatkan studi pustaka. Studi pustaka adalah sekumpulan aktivitas dalam melakukan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat yang kemudian diolah sebagai bahan penelitian (Zed, 2008). Dalam hal ini, penulis mengumpulkan beberapa sumber di Perpustakaan Nasional menemukan beberapa artikel surat kabar yang berkaitan dengan topik penelitian seperti surat kabar seperti; *Sinar Hindia*, *Sinar Djawa*, *Njala*, *Kaoem Moeda*, dan beberapa lainnya. Salah satu artikel dalam surat kabar *Njala* yang terbit pada 27-28 April 1926 berjudul “*Indonesia terlampau soeboer, soeboer bagi toemboehnja Komunisme, Anarchisme dan Nihilisme*” menjelaskan mengenai situasi kaum pergerakan makin dipersempit oleh pemerintah Hindia Belanda. Di artikel ini menyebutkan bahwa “Vergader-verbod (larangan mengadakan rapat) sadja soedah memaksa soepaja kommunisten mendjadi anarcho communistch”. Pencarian surat kabar juga dilakukan secara daring melalui laman www.Delpher.nl untuk mencari surat kabar berbahasa Belanda yang relevan dengan tema skripsi.

Sumber sekunder juga memiliki arti penting sebagai penunjang sumber primer. Sumber sekunder digunakan sebagai mempertajam penulis dalam

menjangkau pemahaman tentang topik yang diangkat. Penulis menggunakan sumber sekunder dari berbagai macam buku dan jurnal ilmiah terkait seperti diterangkan dalam bagian sumber penelitian. Buku dan jurnal didapatkan seperti Perpustakaan Nasional, Ruang Baca Sejarah UNJ, buku digital, dan koleksi pribadi.

Ketiga, Verifikasi atau kritik sumber merupakan tahapan selanjutnya setelah sumber-sumber telah didapatkan. Dalam kritik sumber terbagi menjadi dua, yaitu: kritik eksternal dan internal. Kritik eksternal meliputi kertas, tinta, gaya bahasa, dan bentuk penampilan luarnya. Kritik internal mencakup isi yang terkandung di dalam tulisan kredibel atau tidak untuk dirujuk menjadi sumber. (Kuntowijoyo, 2013)

Pada tahapan kritik sumber penulis dipaksa atau diharuskan untuk bersikap kritis terhadap sumber yang ditemukan. Sumber harus mengedepankan otentisitas dan kredibilitas. Otentisitas adalah sumber tersebut keadaan sebenarnya. (Dwi Laksono, 2018)

Sebagai contoh, semisal surat kabar *Sinar Hindia* yang terpublikasi pada 27 Maret 1919 dalam artikel yang berjudul “*Merebahkan Peperintahan*” yang ditulis oleh Darsono. Kritik eksternal dalam surat kabar *Sinar Hindia* terlihat dalam kertas yang digunakan secara prinsip sudah melalui tahapan sesuai dengan kaidah keilmuan oleh arsipatoris yang dapat dipertanggungjawabkan otentisitasnya. Selain itu, penggunaan bahasa melayu dengan ejaan lama menambah kebenaran waktu pembuatan surat kabar tersebut.

Sedangkan untuk kritik internal hal yang diperlukan adalah melihat kandungan atau isi dalam sebuah artikel yang diinginkan. Artikel ini berisikan tentang keadaan runtuhnya pemerintahan Tsar yang diharapkan juga terjadi di Hindia Belanda. Terkait surat kabar *Sinar Hindia* dalam artikel tersebut dapat memberikan informasi terkait tema yang diangkat oleh penulis.

Keempat, Interpretasi bermakna penafsiran mengenai suatu kejadian atau peristiwa, fakta sejarah, dan merangkainya menjadi satu kesatuan yang logis (Dwi Laksono, 2018). Kegiatan pemaknaan sumber yang telah diverifikasi agar sumber tersebut lebih bernyawa dengan landasan objektif, supaya subjektivitas yang dimiliki oleh penulis tidak serampangan.

Kegiatan interpretasi bisa dilakukan dengan cara analisis dan sintesis. Analisis menggunakan cara induktif, sedangkan sintesis sebaliknya (W. Pranoto, 2010). Semisal dalam mencari tentang ‘anarkisme’ dengan cara sintesis bisa mencari data seperti aksi langsung, sabotase, bom, atau menolak membayar pajak juga merupakan bentuk dari anarkisme.

Kelima, Historiografi merupakan kulminasi dari metode sejarah. Setelah penulis dihadapkan sekelumit tahapan dari pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi, hingga interpretasi harus dituangkan ke dalam penulisan sejarah. Dalam hal ini, penulis menggunakan penulisan deskriptif-naratif.

2. Sumber Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua sumber dalam menunjang keabsahan pembahasan, yaitu: sumber primer dan sekunder. Karena rentang waktu yang diangkat sudah puluhan tahun, maka penulis menggunakan studi kepustakaan dalam mencari sumber yang relevan. Pada sumber primer, penulis lebih banyak menggunakan surat kabar sezaman baik itu berbahasa Indonesia (Melayu) maupun Belanda seperti *Api*, *De Volharding*, *Kaoem Moeda*, *Njala*, *Si Tetap*, *Sinar Djawa*, *Sinar Hindia*, *Soera Ra'jat*, dan surat kabar lainnya.

Sedangkan sumber sekunder yang terkait, antara lain buku *The Rise of Indonesian Communism* karya Ruth Thomas McVey, *Di bawah Lentera Merah: Sejarah Riwayat Sarekat Islam Semarang Sampai Tahun 1920* karya Soe Hok Gie, *Perang yang Tidak Akan Kita Menangkan: Anarkisme dan Sindikalisme dalam Pergerakan Kolonial hingga Revolusi Indonesia (1908-1948)* karya Bima Putra Satria, *Kota Merah Hitam: Lintasan Waktu Anarkisme di Semarang* karya Pujo Nugroho, *Zaman Bergerak: Radikalisme di Jawa 1912-1926* karya Takashi Shiraishi, *The Origins of Malayan Communism* karya C.F Yong.

Selain itu penulis juga menggunakan beberapa jurnal relevan seperti *'Volk van Java, de Russische Revolutie houdt ook lessen in voor U': Indonesisch socialisme, bolsjewisme, en het spook van het anarchisme* karya Klaas Stutje, *Anti-colonial struggles in Malaya and the East Indies:*

the Anarchist Party, the Society of Truth, and the Workers' Party in the South Seas karya Michael Schmidt, *Weeping Qingdao Tears Abroad: Locating Chinese Publics in Colonial Malaya, circa 1919*



*Mencerdaskan dan
Memartabatkan Bangsa*